

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambatan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);
- 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2017 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai sebesar Rp 1.402.637.750,- atau 120,24% dari anggaran sebesar Rp 1.166.500.000,- **dan** mengalami *kenaikan sebesar 20,24%*. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	187.000.000,00	94.645.000,00	92.645.000,00	50,61	0,00
2.	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	875.500.000,00	1.237.823.750,00	363.323.750,00	141,38	924.180.900,00
3.	Pendapatan lain-lain yang syah	104.000.000,00	70.169.000,00	33.831.000,00	67,47	104.109.000,00

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp. 12.425.767.995,- dan anggaran sebesar Rp. 14.163.075.000,- atau mencapai 87,73%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp. 12.634.681.662,- realisasinya mengalami penurunan sebesar 1,65%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	5.585.900.000,-	4.920.307.327,-	88,08
2. Belanja Barang	3.356.073.000,-	3.154.810.343,-	94,00
3. Belanja Hibah	3.605.567.000,-	3.113.353.650,-	86,35
4. Belanja Bantuan Sosial	62.265.000,-	62.250.000,-	99,98
Jumlah Belanja Operasi	12.609.805.000,-	11.250.721.320,-	89,22
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	736.290.000,-	556.223.675,-	75,54
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	816.980.000,-	618.823.000,-	75,75
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	00,00
Jumlah Belanja Modal	1.553.270.000,-	1.175.046.675,-	75,65
JUMLAH BELANJA	14.163.075.000,-	12.425.767.995,-	87,73

2 Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2017	REALISASI T.A. 2017	PROSENTASE %
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	50.000.000,-	49.954.448,-	99,91
Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	50.000.000,-	49.954.448,-	99,91
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	455.800.000,-	439.444.966,-	98,57
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,-	2.431.530,-	97,26
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000,-	63.779.533,-	99,95
Kegiatan Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	72.500.000,-	72.461.893,-	99,95
Kegiatan Penyediaan jasa adminisrasi keuangan	37.500.000,-	37.500.000,-	100,00
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,-	19.995.150,-	99,98
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.000.000,-	14.000.000,-	100,00
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,-	19.999.250,-	100,00
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.500.000,-	15.500.000,-	100,00
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.500.000,-	4.495.000,-	99,89
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	4.000.000,-	3.987.610,-	99,69
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	24.000.000,-	24.000.000,-	100,00
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	101.300.000,-	101.300.000,-	100,00
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.000.000,-	59.995.000,-	99,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144.870.000,-	144.855.000,-	99,99
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000,-	8.000.000,-	100,00
Kegiatan pengadan mebeleur	17.050.000,-	17.050.000,-	100,00
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.970.000,-	100.955.000,-	99,99
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18.850.000,-	18.850.000,-	100,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5.012.288.000,-	4.280.631.314,-	85,40
Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	447.873.000,-	376.431.473,-	84,05
Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan	2.924.245.000,-	2.617.573.445,-	89,51
Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	1.291.490.000,-	938.442.600,-	72,66
Kegiatan pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan	48.680.000,-	48.679.796,-	100,00
Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul	300.000.000,-	299.504.000,-	99,83

Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.028.610.000,-	1.702.820.512,-	83,94
Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	73.900.000,-	73.399.877,-	99,32
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	350.000.000,-	224.291.618,-	64,08
Kegiatan pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	626.210.000,-	624.154.037,-	99,67
Kegiatan pengembangan sarana alat tangkap	390.000.000,-	388.479.107,-	99,61
Kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	588.500.000,-	392.495.873,-	66,69
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	175.388.000,-	170.193.909,-	97,04
Kegiatan pembinaan pelaku usaha perikanan	175.388.000,-	170.193.909,-	97,04
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	355.978.000,-	349.649.140,-	98,22
Kegiatanpeningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasaran benih bibit unggul	355.978.000,-	349.649.140,-	98,22
Program Pelayanan Usaha Perikanan	224.616.000,-	221.595.548,-	98,66
Kegiatan fasilitasi pelayanan usaha perikanan	224.616.000,-	221.595.548,-	98,66
Program Pengembangan Data/Informasi	433.800.000,-	428.515.831,-	98,78
Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dojumen perencanaan	433.800.000,-	428.515.831,-	98,78
Jumlah Belanja	8.871.350.000,-	7.787.660.668,-	87,78

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 antara lain :

- a. Pendapatan
 - 1. Tidak ada hambatan ataupun kendala, karena dari taerget pendapatan Rp. 1.166.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.402.637.750,- (120,24 %) dan melebihi target karena adanya upaya-upaya dalam optimalisasi pencapaian target terutama pendapatan dari Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Belanja
 - 1. Belanja Tidak langsung dari anggaran Rp. 5.291.725.000,- tidak terserap seluruhnya, hanya sebesar Rp. 4.695.126.927,- (88,73%) dikarenakan adanya perubahan jumlah pegawai baik karena pensiun maupun karena beralihnya status kepegawaian tenaga penyuluh perikanan ke pusat yang mencapai 19 orang karyawan per Agustus 2017.
 - 2. Belanja langsung, untuk belanja pegawai sebesar Rp. 294.175.000,- tidak terserap seluruhnya, hanya Rp. 282.200.000,- (95,93%) dikarenakan adanya

beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (pameran pembangunan) sehingga post untuk honor pelaksana tidak jadi dikeluarkan

3. Belanja barang dan jasa pada belanja langsung dari anggaran Rp. 7.023.905.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 6.330.413.993,- (90,13%) dikarenakan adanya pengadaan barang/jasa yang melalui pihak ketiga dengan metode lelang. Nilai kontrak yang ada setelah proses lelang itu harganya sangat menurun dari pagu anggaran, sehingga didapatkan banyak sisa anggaran dari sisa tender.
4. Belanja modal pada belanja langsung dari anggaran Rp. 1.553.270.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 1.175.046.675,- (75,65%) dikarenakan adanya pengadaan barang melalui pihak ketiga dengan metode lelang. Dimana nilai kontrak sangat menurun dibandingkan pagu anggaran yang ada, sehingga sisa anggaran berasal dari sisa tender.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp 1.166.500.000,-
Terealisasikan sebesar Rp 1.402.637.750,- atau 120,24% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun Anggaran 2017

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.166.500.000	1.402.637.750	236.137.750	120,24	1.020.971.900

Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 mencapai target sebesar 120,24% dari anggaran dan naik 37,38% dari realisasi Tahun 2016.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.402.637.750,00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2017		%	Realisasi 2016 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	0	0	0	0
Retribusi Daerah	1.062.500.000	1.332.468.750	125,40	916.071.900
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.000.000	70.169.000	67,47	104.900.000
Jumlah	1.166.500.000	1.402.637.759	120,24	1.020.971.900

	Anggaran	Realisasi
1) Retribusi Daerah	Rp. 1.062.500.000,00	Rp. 1.332.468.750,00

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.062.500.000,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2017		%	Realisasi 2016 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	187.000.000,00	94.645.000,00	50,61	0,00
- Sewa lahan tambak udang	187.000.000,00	94.645.000,00	50,61	0,00
Retribusi Tempat Pelelangan	875.500.000,00	1.237.823.750,00	141,38	916.071.900,00
1. TPI Argopeni	159.000000,00	130.770.350,00	82,24	89.125.000,00
2. TPI Karangduwur	410.000.000,00	427.670.100,00	104,30	325.868.750,00
3. TPI Pasir	192.750.000,00	397.385.900,00	206,16	184.475.650,00
4. TPI Logending	87.000.000,00	255.925.800,00	294,16	198.401.550,00
5. TPI Tanggulangin	11.000.000,00	11.333.850,00	103,03	8.978.000,00
6. TPI Rowo	4.500.000,00	4.509.000,00	100,20	5.555.000,00
7. TPI Tegalretno	7.500.000,00	9.192.750,00	122,57	6.420.950,00
8. TPI Criwik	3.750.000,00	1.036.000,00	27,60	1.432.000,00
9. Retribusi sewa lahan di TPI	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
JUMLAH	1.062.500.000,00	1.332.468.750,00	125,40	916.071.900,00

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 125,40%, mengalami kenaikan sebesar 45,45% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2016 yang sebesar Rp. 916.071.900,00. Hal itu disebabkan adanya tambahan obyek retribusi yang berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari sewa lahan tambak udang dan juga adanya peningkatan hasil produksi ikan tangkapan nelayan.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp. 70.169.000,00 dari anggaran sebesar Rp.104.000.000,00, terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2017		(%)	Realisasi 2016 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Lain-lain PAD yang syah lainnya	104.000.000,00	70.169.000,00	67,47	104.900.000,00
Jumlah	104.000.000,00	70.169.000,00	67,47	104.900.000,00

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 terealisasi 67,47%, turun sebesar 33,10% dibandingkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2016 yang sebesar Rp.104.900.000,00, hal ini dikarenakan mulai tahun 2017 tambak dinas tidak dikelola sendiri oleh dinas melainkan disewakan oleh pihak ketiga, sehingga target anggaran yang semula dua obyek menjadi satu obyek. Untuk sewa tambak masuk ke retribusi pemakaian kekayaan daerah.. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mencapai target yaitu pendapatan dari

penjualan hasil perikanan.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi obyek-obyek retribusi (optimalisasi tempat pelelangan ikan dan BBI)
- 2. Penggalian sumber retribusi yang lain (sewa lahan tambak udang)
- 3. Menambah obyek retribusi seperti sewa lahan disekitar kantor untuk usaha yang lain dan sewa tanah untuk SPDN di Ayah serta sewa lapak di Pasar Ikan Ungaran.

B. BELANJA- LRA

Realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2017 adalah sebesar Rp.12.425.767.995,- atau 87,73% dari anggaran sebesar Rp. 12.609.805.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2017 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	5.585.900.000,-	4.920.307.327,-	88,08	4.836.166.392,-
2. Belanja Barang	3.356.073.000,-	3.154.810.343,-	94,00	2.927.658.670,-
3. Belanja Hibah	3.605.567.000,-	3.113.353.650,-	86,35	2.086.244.600,-
4. Belanja Bantuan Sosial	62.265.000,-	62.250.000,-	99,98	709.795.000,-
Jumlah Belanja Operasi	12.609.805.000,-	11.250.721.320,-	89,22	10.559.864.662,-
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	0,00	0,-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	736.290.000,-	556.223.675,-	75,54	471.385.000,-
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	816.980.000,-	618.823.000,-	75,75	1.654.766.500,-
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	00,00	15.000.000,-
Jumlah Belanja Modal	1.553.270.000,-	1.175.046.675,-	75,65	2.141.151.500,-
JUMLAH BELANJA	14.163.075.000,-	12.425.767.995,-	87,73	12.701.016.162,-

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dengan TA. 2016 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA.2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 275.248.167,- atau sebesar 2,16%.

Dengan rincian Belanja Operasional mengalami kenaikan sebesar Rp. 690.856.658,- atau 6,54% dan Belanja Modal turun sebesar Rp. 966.104.825,- atau

sebesar 45,12%.

a) *Belanja Operasional*

Realisasi belanja operasional sebesar Rp.11.250.721.320,- mencapai 89,22% dari anggaran sebesar Rp.12.609.805.000,- apabila dibandingkan dengan realisasi 2016 yang sebesar Rp.10.559.864.662,- mengalami peningkatan sebesar 6,54%.

Belanja operasional terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah TA. 2017 dan 2016 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016
1. Belanja Pegawai	5.585.900.000,-	4.977.326.927,-0	89,11	4.836.706.392,-
a. Gaji dan Tunjangan	4.331.000.000,-	3.845.326.927,-	88,79	4.241.649.017,-
b. Tambahan Penghasilan PNS	902.400.000,-	806.025.000,-	89,32	401.244.375,-
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,-	0,-	0,00	0,-
d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,-	0,-	0,00	0,-
e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	58.325.000,-	43.775.000,-	75,05	0,-
f. Uang Lembur	16.415.000,-	16.400.000,-	99,90	4.568.000,-
g. Belanja Honorarium PNS	236.760.000,-	224.800.000,-	94,94	183.165.000,-
h. Belanja Honorarium Non PNS	41.000.000,-	41.000.000,-	100,00	6.080.000,-
2 .Belanja barang	3.418.338.000,-	3.217.060.343,-	94,11	2.927.658.670,-
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	314.598.000,-	313.394.849,-	99,62	316.388.182,-
b. Belanja Bahan/Material	211.145.000,-	210.456.900,-	99,67	302.844.000,-
c. Belanja Jasa Kantor	141.095.000,-	128.962.143,-	91,47	168.888.564,-
d. Belanja Premi Asuransi	0,-	0,-	0,00	0,-
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154.977.200,-	152.805.030,-	98,60	129.467.974,-
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	186.063.800,-	183.897.365,-	98,84	122.681.100,-
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,-	0,-	0,00	0,-
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00	0,-
i. Belanja Sewa Alat Berat	0,-	0,-	0,00	0,-
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.821.000,-	16.761.400,-	99,65	25.061.500,-
k. Belanja Makanan dan Minuman	177.158.000,-	175.723.000,-	99,18	102.304.250,-
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,-	0,-	0,00	0,-
m. Belanja Pakaian Kerja	0,-	0,-	0,00	5.400.000,-
n. Belanja Pakaian khusus dan hari- hari tertentu	450.000,-	450.000,-	100,00	300.000,-
o. Belanja Perjalanan Dinas	603.395.000,-	603.059.656,-	99,94	463.289.200,-
p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,-	0,-	0,00	0,-
q. Belanja Pemeliharaan	662.270.000,-	489.209.000,-	73,87	85.841.900,-
r. Belanja Jasa Konsultansi	386.000.000,-	380.171.000,-	98,49	707.320.000,-
s. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.265.000,-	62.250.000,-	99,98	0,-
t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,-	0,-	0,00	0,-
u. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.850.000,-	12.080.000,-	93,77	0,-
v. Belanja Pegawai BLUD	0,-	0,-	0,00	0,-
w. Biaya Jasa Pihak Ketiga	478.800.000,-	477.420.000,-	99,71	492.872.000,-
x. Belanja Beasiswa peserta didik	0,-	0,-	0,00	0,-
y. Belanja Barang Dan Jasa BLUD	0,-	0,-	0,00	0,-
z. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.450.000,-	7.450.000,-	100,00	5.000.000,-
3.Belanja Hibah	3.605.567.000,-	3.113.353.650,-	86,35	2.086.244.600,-
a. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.605.567.000,-	3.113.353.650,-	86,35	2.086.244.600,-
b. Belanja Hibah kepada Organisasi	0,-	0,-	0,00	0,-

Kemasyarakatan				
----------------	--	--	--	--

4. Belanja Bantuan sosial	0,-	0,-	0,00	709.795.0000,-
a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,-	0,-	0,00	0,-
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,-	0,-	0,00	709.795.0000,-
Total Belanja Operasii	12.609.805.000,-	11.307.740.920,-	89,67	10.560.404.662,

Belanja hibah sebesar Rp. 3.113.353.650 direalisasikan untuk pengadaan benih ikan, pakan ikan serta peralatan perikanan untuk pengembangan kawasan agrobisnis perikanan, bantuan benih dan pakan ikan untuk pokdakan dan juga digunakan untuk pembelian mesin kapal untuk nelayan.

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2017		%	Realisasi 2016 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0,-	0,-	0,00	0,-
Belanja Peralatan dan Mesin	736.290.000,-	556.223.675,-	75,54	471.385.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan	801.980.000,-	603.838.000,-	75,29	1.654.766.500,-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,00	0,-
Belanja Aset tetap Lainnya	15.000.000,-	14.985.000,-	99,90	15.000.000,-
Belanja Aset Tak Berwujud	0,-	0,-	0,00	0,-
JUMLAH	1.553.270.000,-	1.175.046.675,-	75,65	2.141.151.500,-

Realisasi belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.1.175.046.675,- atau tercapai 75,65% dari anggaran sebesar Rp.1.553.270.000,- Dibandingkan realisasi tahun 2016 yang sebesar Rp.2.142.151.500,- realisasi belanja modal tahun 2017 turun sebesar 45,12%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.Belanja Tanah	0,-	0,-	0,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	736.290.000,-	556.223.675,-	75,54
3. Belanja Gedung dan Bangunan	801.980.000,-	603.838.000,-	75,29
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,00
5.Belanja Aset tetap Lainnya	15.000.000,-	14.985.000,-	99,90
6. Belanja Aset Tak Berwujud	0,-	0,-	0,00
Jumlah	1.553.270.000,-	1.175.046.675,-	75,65

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 99,90% adalah belanja modal asset tetap lainya yang berupa pemasangan pintu gerbang sebelah barat dan timur gedung kantor. Sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu belanja modal gedung dan bangunan dengan realisasi 75,29%, hal ini disebabkan karena pada saat pelelangan, harga penawarannya sangat

menurun dari pagu anggaran yang ada, sehingga menyisakan banyak anggaran.

Kontribusi terbesar belanja modal adalah belanja modal gedung dan bangunan, yang mencapai 51,38% dari total belanja modal, kemudian belanja peralatan dan mesin sebesar 47,33%, belanja asset tetap lainnya sebesar 1,29%.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan –LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.400.137.750,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO			
No	Pendapatan – LO	2017(Rp)	2016 Audited (Rp)
1	PAD – LO	1.400.137.750,-	926.680.900,-
2	Transfer – LO	0,-	0,-
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,-	0,-
	Jumlah	1.400.137.750,-	926.680.900,-

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2017 meningkat sebesar Rp.473.456.850,- atau sebesar 51,09% dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban

Realisasi Beban Dinas Kelautan dan Perikanan pada TA.2017 adalah sebesar Rp.11.238.743.391,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2017 dan 2016

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	Kenaikan /Penurunan %
BEBAN	11.238.743.391,-	13.422.285.215,-	16,27
Beban Operasi	11.238.743.391,-	13.422.285.215,-	16,27
Beban Transfer	0,-	0,-	0,00
Beban Luar Biasa	0,-	0,-	0,00
Total Beban	11.238.743.391,-	13.422.285.215,-	16,27

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2017 sebesar Rp. 11.238.743.391,- terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	4.920.307.327,-	4.836.166.392,-	1,74
2	Beban Barang dan Jasa	3.142.832.414,-	2.931.154.727,-	7,22
6	Beban Bunga	0,-	0,-	0,00
7	Beban Subsidi	0,-	0,-	0,00
8	Beban Hibah	3.113.353.650,-	2.086.244.600,-	49,23
9	Beban Bantuan Sosial	62.250.000,-	709.795.000,-	91,23
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,-	2.858.924.496,-	100
11	Beban Penyisihan Piutang	0,-	0,-	0,00
12	Beban Lain - Lain	0,-	0,-	0,00
	Jumlah	11.238.743.391,-	13.422.285.215,-	16,27

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi beban operasi LO tahun 2017 menurun sebesar Rp.2.183.541.824,- atau sebesar 16,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

- a. Beban Pegawai
Realisasi Beban Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.920.307.327-
- b. Beban Barang dan Jasa
Realisasi Beban Barang Jasa TA 2017 sebesar Rp.3.142.832.414,-
- c. Beban Hibah
Realisasi Beban Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2017 sebesar Rp . 3.113.353.650,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Beban	Penerima
1	2	3	4
1	Pengadaan prasarana budidaya agribisnis perikanan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	628.628.000,-	Kelompok perikanan di Desa Purwodadi Kec. Kuwarasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Ambal
2	Pengadaan bibit dan pakan ikan pada Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	319.450.000,-	Pokdakan di Kabupaten Kebumen yang masuk dalam usulan musrenbang
3	Pengadaan benih ikan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	456.300.000,-	Kelompok perikanan di Desa Purwodadi Kec. Kuwarasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Ambal
4	Pengadaan sepeda motor roda tiga pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	65.970.000,-	Kelompok perikanan di Desa Purwodadi Kec. Kuwarasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Ambal
5	Pengadaan pakan ikan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	1.095.024.000,-	Kelompok perikanan di Desa Purwodadi Kec. Kuwarasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Ambal
6	Pengadaan peralatan sarana produksi perikanan dan pengadaan	195.174.650,-	Kelompok perikanan di Desa Purwodadi Kec.

	peralatan elektronik dan mekanik pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan		Kuwarasan, Desa Sidoluhur dan Sinungrejo Kec. Ambal
--	--	--	---

7	Pengadaan mesin motor tempel pada Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap	317.772.000,-	KUB di Kabupaten Kebumen
8.	Honorarium PPHP dan Pejabat Pengadaan barang/jasa hibah	35.035.000,-	PPHP dan Pejabat pengadaan barang/jasa
	Jumlah	3.113.353.650,-	

- d. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.0,- merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	576.017.604,-	
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	263.607.112,-	
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.708.480,-	
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,-	0,-
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	0,-	0,-
	Jumlah	1.023.333.196,-	2.858.924.496,-

- e. Beban Penyisihan Piutang
- Beban Penyisihan piutang Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,-

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,-	0,-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

Surplus/defisit –LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2017 sebesar Rp.9.88.605.641,- atau turun sebesar 21,26% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.12.495.604.315,-

D. Neraca

1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.268.154,- dan Rp. 4.397.100,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Aset Lancar	TA 2017	TA 2016
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.962.200.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	2.500.000.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	14.305.954,00	1.897.100,00
	Jumlah	21.268.154.00	4.397.100.00

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,- saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD Dinas Kelautan dan Perikanan per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen	0,-	29 Desember 2017
2.			
3.			

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp. 6.962.200,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

Per 31 Desember 2017 masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	6.962.200,-	30 Desember 2017
2.		

3.		
----	--	--

3). Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-. Saldo Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Kas Lainnya	Nilai (Rp)	Ket
1.	Kas di BLUD	0,-	Dana BLUD
2.	Kas di Bendahara BOS	0,-	Dana BOS
	Jumlah	0,-	

4). Piutang

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp.0,- terdiri dari:

Rincian Piutang
per 31 Desember 2017

PIUTANG DAERAH	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 Audited (Rp)
1) Piutang Pendapatan	0,-	2.500.000,-
a. Piutang Pajak	0,-	0,-
b. Piutang Retribusi	0,-	2.500.000,-
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,-	0,-
d.Piutang Lain-Lain PAD yang sah	0,-	0,-
2) Piutang Lainnya	0,-	0,-
JUMLAH	0,-	2.500.000,-

Penjelasan masing-masing jenis piutang diuraikan sebagai berikut:

Saldo Piutang Pendapatan sebesar Rp.0,- per 31 Desember 2017 terdiri dari:

a. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dalam bentuk pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB). Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapanannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2017dengan perincian sebagai berikut:

PIUTANG PAJAK	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 Audited (Rp)
a. Pajak Hotel	0,-	0,-
b. Pajak Restoran	0,-	0,-
c. Pajak Hiburan	0,-	0,-
d. Pajak Air Tanah	0,-	0,-
e. Pajak Parkir	0,-	0,-

f. Pajak BPHTB	0,-	0,-
g. Piutang PBB	0,-	0,-
Saldo Piutang Pajak	0,-	0,-

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah. Jumlah berikut merupakan saldo piutang retribusi yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- dengan perincian sebagai berikut:

Piutang Retribusi	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 Audited (Rp)
– Retribusi Pelayanan Pasar	0,-	0,-
– Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,-	0,-
– Retribusi TPI	0,-	2.500.000,-
– Dst	0,-	0,-
– dst	0,-	0,-
Jumlah	0,-	2.500.000,-

c. Penyisihan piutang pendapatan

merupakan estimasi atas jumlah piutang pendapatan yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode berdasarkan penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2017 terdiri dari:

PIUTANG DAERAH	NILAI PIUTANG BRUTO (Rp)	NILAI PENYISIHAN PIUTANG (Rp)	NILAI NRV PIUTANG (Rp)
a. Piutang Pajak	0,-	0,-	0,-
b. Piutang Retribusi	0,-	0,-	0,-
c. Piutang PAD lainnya	0,-	0,-	0,-
JUMLAH	0,-	0,-	0,-

5). Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.305.954,- dan Rp.1.897.100,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp. 14.305.954,- merupakan saldo persediaan atas bahan habis pakai yang belum habis/belum digunakan sampai dengan

tanggal neraca.

NO	PERSEDIAAN	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 Audited (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	3.466.454,-	1.897.100,-
2.	Bahan/Material	2.875.000,-	0,-
3.	Barang Lainnya	7.964.500,-	0,-
	Jumlah	14.305.954,-	1.897.100,-

6). Aset Tetap

Nilai AsetTetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 13.297.045.182,- dan Rp. 90.003.970.076,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2017	T.A. 2016
1	Tanah	3.810.798.000,-	4.759.467.150,-
2	Peralatan dan Mesin	4.819.473.966,-	4.482.180.356,-
3	Gedung dan Bangunan	13.180.355.530,-	19.603.567.687,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.348.259.515,-	74.020.596.712,-
5	Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	12.861.841.829,-	5.929.952.495,-
	Jumlah	13.297.045.182, -	16.418.136.516,-

a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 3.810.789.000,- dan Rp. 4.759.467.150,-

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	Rp. 4.759.467.150,-
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 0, -
Mutasi dari SKPD lain	Rp 0, -
Koreksi tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	Rp 0,-
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0,-
penghapusan	Rp 0, -
Hibah	Rp 946.669.150,-

Total kurang	Rp 946.669.150,-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp. 3.810.798.000,-

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah OPD Dinilutkan untuk kawasan usaha perikanan	Rp 2.681.981.000	Rp -	Rp -	Rp 2.681.981.000
2	Tanah untuk bangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 613.673.000	Rp -	Rp -	Rp 613.673.000
3	Tabah bangunan untuk BBI	Rp 268.044.000	Rp -	Rp -	Rp 268.044.000
4	Tanah dan bangunan untuk tambak dinas	Rp 229.600.000	Rp -	Rp -	Rp 229.600.000
5	Tanah dan bangunan untuk gedung TPI	Rp 948.669.150	Rp -	Rp 948.669.150	Rp -
6	Tanah untuk SPBU	Rp 17.500.000	Rp -	Rp -	Rp 17.500.000
	Jumlah	Rp 4.759.467.150	Rp -	Rp 948.669.150	Rp 3.810.798.000

Adapun Tanah OPD senilai Rp. 3.810.798.000,- terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Tahun	Luas (m2)	Nilai Perolehan
1	Desa Pesisir (Tanggulangi dan Tegalretno)	Klirong, Petanah	2016	1.444.555	2.681.981.000,00
2	Desa Kawedusan	Kebumen	1981	1.670	559.450.000,00
3	Desa Kawedusan	Kebumen	1997	559	54.223.000,00
4	Desa Pringtutul	Rowokele	1991	12.361	173.054.000,00
5	Desa Pringtutul	Rowokele	1994	6.785	94.990.000,00
6	Desa Ayah	Ayah	1994	16.400	229.600.000,00
7	Desa Ayah	Ayah	2006	500	17.500.000,00
	Jumlah			1.482.830	3.810.798.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 4.819.473.966,- dan Rp. 4.482.180.356,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 4.482.180.356,-
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 718.667.675, -
Mutasi dari SKPD lain	Rp 0, -
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp 0, -
Total tambah	Rp 718.667.675, -
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp 0,-
Rusak Berat	Rp 367.553.337, -
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0, -
Koreksi	Rp 1.899.000, -
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp 11.921.728, -
Total kurang	Rp 381.374.065, -
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 4.819.473.966,-

Adapun mutasi tambah sebesar Rp. 718.667.675,- merupakan belanja modal pada tahun 2017 (detail terlampir). Nilai mutasi tambah sebesar Rp 718.667.675,-

merupakan mutasi tambah peralatan dan mesin yang diterima dari pembelian/pengadaan barang sebaagai berikut :

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan
1	Alat-alat besar	2017	21	Unit	61.807.600,-
2	Alat-alat angkutan	2017	2	Unit	90.500.000,-
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	2017	60	Unit	30.000.000,-
4	Alat-alat pertanian/peternakan	2017	130	Unit	401.568.900,-
5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	2017	113	Unit	70.881.425,-
6	Alat-alat studio dan komunikasi	2017	2	Unit	4.181.250,-
7	Alat-alat kedokteran	2017	17	Unit	38.034.500,-
8	Alat-alat laboratorium	2017	18	Unit	21.694..000,-
	Jumlah		363		718.667.675,-

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp 381.374.065,- merupakan mutasi keluar atas aset-aset yang dalam kondisi rusak berat pada Tahun 2017 sebesar Rp. 367.553.337,- dan Koreksi sebesar Rp. 1.899.000,- merupakan koreksi yang disebabkan oleh adanya temuan BPK terkait kesalahan dalam pembayaran pengadaan barang (pengadaan motor trail yang menyebabkan setor kembali). Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 11.921.728 , merupakan reklas atas aset peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi, sehingga di reklas ke Aset Ekstrakomtable. Adapun data sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Alat kantor lainnya	2017	47	unit	Rp 4.935.000	Jaket pelampung
2	Alat kantor lainnya	2017	47	unit	Rp 6.110.000	Jaket pelampung
3	Alat produksi perikanan lain	2017	1	paket	Rp 876.728	untuk BBI
	Jumlah				Rp 11.921.728	

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp Rp. 4.819.473.966,- sebagaimana mutasi berikut:

No	Lokasi Peralatan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Alat-alat Besar	152.091.000	61.807.600	16.999.000	196.899.600
2	Alat-alat angkutan	2.122.211.600	90.500.000	21.649.000	2.191.062.600
3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	173.586.100	30.000.000	60.425.850	143.160.250
4	Alat-alat pertanian/peternakan	17.790.000	401.568.900	5.531.000	413.827.900
5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.598.597.656	70.881.425	197.169.215	1.472.309.866
6	Alat-alat studio dan komunikasi	231.891.000	4.181.250	79.600.000	156.472.250
7	Alat-alat kedokteran	3.819.000	38.034.500		41.853.500
8	Alat-alat laboratorium	182.194.000	21.694.000		203.888.000
	Jumlah	4.482.180.356	718.667.675	381.374.065	4.819.473.966

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 13.180.355.530,- dan Rp. 19.603.567.687,-

Saldo per 31 Desember 2016	19.603.567.687,-
Mutasi tambah:	835.707.000,-
Belanja Modal	456.379.000,-
Mutasi dari SKPD lain	0,-
Koreksi / Reklas tambah Aset	379.328.000,-
Total Tambah	835.707.000,-
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	7.258.919.157,-
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	7.258.919.157,-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 13.180.355.530,

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 13.180.355.530,- terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Gedung kantor	Rp 10.456.924.782	Rp 647.846.000	Rp 4.008.936.857	Rp 7.095.833.925
2	Gudang	Rp 871.102.800	Rp -	Rp 63.266.000	Rp 807.836.800
3	Gedung laboratorium	Rp 33.800.000	Rp -	Rp -	Rp 33.800.000
4	Gedung tempat pertemuan	Rp 522.720.000	Rp -	Rp 261.360.000	Rp 261.360.000
5	Gedung tempat pendidikan	Rp 62.620.000	Rp -	Rp -	Rp 62.620.000
6	Gedung pertokoan/koperasi pasar	Rp 2.040.049.900	Rp -	Rp 908.735.000	Rp 1.131.314.900
7	Gedung untuk pos jaga	Rp 1.249.226.000	Rp -	Rp 1.163.126.000	Rp 86.100.000
8	Gedung tempat kerja lainnya	Rp 4.562.109.500	Rp -	Rp 853.495.300	Rp 3.708.614.200
	Jumlah	Rp 19.798.552.982	Rp 647.846.000	Rp 7.258.919.157	Rp 13.187.479.825

Belanja Modal sebesar Rp 456.379.000,- merupakan belanja Modal OPD untuk bangunan gedung kantor pada tahun 2017 (rekap terlampir). Adapun penambahan sebesar Rp 647.846.000,- dikarenakan mutasi tambah antar SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung/Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Gedung kantor permanen	2.014	80	m2	Rp 355.977.000	rehabilitasi
2	Gedung kantor permanen	2.014	1.170	m2	Rp 291.869.000	rehabilitasi
	Jumlah				Rp 647.846.000	

Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 7.258.919.157,- merupakan penghapusan atas Gedung yang berada di luar kantor dinas kelautan dan perikanan karena diserahkan ke propinsi. Adapun rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung /Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Gedung Kantor permanen	2002	60	m2	30.300.000	Hibah ke provinsi
2	Gedung Kantor permanen	2014	750	m2	1.347.858.240	Hibah ke provinsi
3	Gedung Kantor permanen	2015	162	m2	583.649.578	Hibah ke provinsi
4	Gedung Kantor permanen	2015	45	m2	145.876.119	Hibah ke provinsi
5	Gedung Kantor permanen	2015	112,50	m2	974.899.572	Hibah ke provinsi
6	Gedung Kantor permanen	2015	72	m2	131.967.328	Hibah ke provinsi
7	Gedung Kantor permanen	2015	12,96	m2	17.430.805	Hibah ke provinsi
8	Gedung kantor lainnya	2007	216	m2	380.766.617	Hibah ke provinsi
9	Gedung kantor lainnya	2007	35	m2	40.100.000	Hibah ke provinsi
10	Gedung kantor lainnya	2013	84	m2	67.004.000	Hibah ke provinsi
11	Gedung kantor lainnya	2015	80	m2	289.084.598	Hibah ke provinsi
12	Gudang	2002	200	m2	63.266.000	Hibah ke provinsi
13	Gedung pertemuan	2008	80	m2	261.360.000	Hibah ke provinsi
14	Gedung pertokoan	2016	312	m2	908.735.000	Hibah ke provinsi
15	Pos jaga permanen	2013	85	m2	324.156.000	Hibah ke provinsi
16	Pos jaga permanen	2013	157	m2	838.970.000	Hibah ke provinsi
17	Gedung tempat kerja	2007	599	m2	209.477.800	Hibah ke provinsi
18	Gedung tempat kerja	2009	109	m2	206.534.500	Hibah ke provinsi
19	Gedung tempat kerja lainnya	2007	34	m2	134.599.000	Hibah ke provinsi
20	Gedung tempat kerja lainnya	2008	35	m2	55.440.000	Hibah ke provinsi
21	Gedung tempat kerja lainnya	2010	110	m2	75.000.000	Hibah ke provinsi
22	Gedung tempat kerja lainnya	2010	12	m2	50.000.000	Hibah ke provinsi
23	Gedung tempat kerja lainnya	2011	36	m2	122.444.000	Hibah ke provinsi
	Jumlah				Rp 7.258.919.157	

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 4.348.259.515,- dan Rp 74.020.596.712,-

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 74.020.596.712,-
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 43.150.000,-
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	Rp 43.150.000,-
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp 69.715.487.197,-
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	Rp 69.715.487.197,-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 4.348.259.515,-

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 255.074.800,- merupakan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa jaringan listrik.

Mutasi Kurang sebesar Rp 69.715.487.197,- adalah belanja jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi dan jaringan listrik yang penganggarannya melalui Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tahun sebelumnya dan dimutasikan pada tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jalan dan jembatan	190.315.000,-
2	Bangunan air/irigasi	69.483.375.197,-
3	Jaringan	41.797.000,-
	Jumlah	69.715.487.197,-

Reklas tersebut karena adanya penyerahan/hibah ke propinsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	0, -
Mutasi tambah:		
Belanja Modal 2017	Rp	0, -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	0, -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp	0, -
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	0, -
Penghapusan Aset	Rp	0,-
Rusak Berat	Rp	0,-
Mutasi ke SKPD	Rp	0,-
Koreksi/reklas aset	Rp	0,-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	0, -

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	-
Mutasi tambah:		
Koreksi	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penyelesaian KPD	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-

g. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan TA.2017 dan 2016 adalah sebesar Rp (5.929.952.495,-) dan Rp (12.861.841.829,-) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 merupakan tahun ke-3 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke accrual basis, sehingga tahun 2017 merupakan tahun ke-3 dalam melakukan penyusutan.

7. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan untuk tahun 2017.

8. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 412.103.337,- dan Rp 123.125.000,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 44.500.000,- dan Rp 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 0, -
Mutasi tambah:	
Pembelian Software	Rp 44.500.000,-
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp 0,-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 44.500.000,-

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 367.553.337,- dan Rp 123.125.000,-. Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	Rp 123.125.000,-
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2017	Rp 44.500.000,-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp -
Koreksi	Rp 367.553.337,-
Reklas	Rp 0,-
Total Tambah	Rp 412.103.337,-
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset oleh BPKAD	Rp 23.125.000,-
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp 100.000.000,-
Koreksi	Rp -

Total Kurang	Rp 123.125.000,-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 412.103.337,-

Koreksi tambah sebesar Rp 367.553.337,- merupakan koreksi atas rusak berat yang sedang diajukan penghapusanya, karena penghapusannya baru dilakukan tahun 2018 nanti.

Sedangkan Penghapusan sebesar Rp 23.125.000,- merupakan penghapusan atas kendaraan roda tiga dan mutasi ke SKPD lain sebesar Rp. 100.000.000,-. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Qty	Tahun Perolehan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan roda tiga (Viar)	1	2010	23.125.000,-	Dihapus oleh BPKAD
2	Kendaraan roda 4 (mobil kijang)	1	1994	50.000.000,-	Diserahkan Dinas Perindagsar
3	Kendaraan roda 4 (mobil kijang)	1	1996	50.000.000,-	Diserahkan Disnakertransos
	Jumlah	3		123.125.000,-	

1. KEWAJIBAN

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp 4.815.670,- dan Rp 4.384.745,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,-	0,-
2	Pendapatan diterima Dimuka	0,-	0,-
3	Utang Beban	4.815.670,-	4.384.745,-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,-	0,-
Jumlah		4.815.670,-	4.384.745,-

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2017

2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2017 diterima SKPD sebagai berikut:

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
-----	-----	------------	------------

1.			
2.			
3.			
4.			
	Jumlah	0,-	Nihil

3. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 20.657.490.338,- dan Rp 90.010.919.931;

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 90.010.919.931,- merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2016 sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ekuitas Dana Lancar sebesar | Rp 0,- |
| 2. Ekuitas Dana Investasi sebesar | Rp 0,- |
| 3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar | <u>Rp (10.861.938.837,-)</u> |
| Jumlah | Rp 79.148.981.094,- |

1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Koreksi Nilai Persediaan senilai Rp 0,- | |
| 2. Selisih Revaluasi Aset Tetap Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 0,- | |
| 3. Koreksi Lainnya senilai Rp 69.521.583.202,- merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2017, terdiri dari: | |
| - Pengakuan atas bunga yang terutang | Rp 0,- |
| - Pengakuan atas beban dibayar dimuka | Rp 0,- |
| - Lain-lain | <u>Rp 69.521.583.202,-</u> |

BAB IV. PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (per 31 Desember 2017).

Laporan Keuangan disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP 105 tahun 2000 tentang pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan memperhatikan Kepmendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan juga memperhatikan konsep historis, kecuali untuk beberapa aktiva tertentu seperti yang dijelaskan dalam catatan ini, yang tidak dinilai berdasarkan konsep nilai historis. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS

B. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi rekening-rekening entitas dinas secara keseluruhan tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh kegiatan di masing-masing bidang.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan pemerintah yang dipisahkan baik berbentuk perusahaan daerah maupun yayasan dan entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.

C. Kebijakan Akutansi Aktiva

Aktiva adalah sumberdaya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumberdaya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, rawa/danau, kekayaan dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain.

1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas,

dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aktiva lancar terdiri dari :

a. Kas

- 1) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah.
- 2) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang

b. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
- 2) Piutang terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain dsb
- 3) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan
- 4) Piutang diakui pada saat akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui pada periode berjalan

c. Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi
- 2) Persediaan terdiri dari : bahan habis pakai kantor, obat-obatan, bibit tanaman dsb
- 3) Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan yang dikelompokkan dalam kelompok aktiva lancar
- 4) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau yang masih ada dan belum terpakai
- 5) Persediaan dinilai pada akhir tahun berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

2. Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi

b. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- 1) Penyertaan modal pemerintah pada BUMD, Lembaga Keuangan Daerah dan Badan Usaha Lainnya yang bukan milik Daerah
- 2) Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruspinjamkan
- 3) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan

c. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

- 1) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat kepemilikan
- 2) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai

sahamnya ditetapkan dengan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

3. Aktiva Tetap

- a. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan public.
- b. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran aktiva liannya.
- c. Aktiva tetap antara lain terdiri dari :

1) Tanah

Tanah meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

2) Jalan dan jembatan

Jalan dan jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya

3) Bangunan Air

Bangunan air meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengamanan sungai dan tanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan lain-lain sejenisnya.

4) Instalasi dan jaringan

Instalasi dan jaringan meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

5) Gedung

Gedung meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan dan lain-lain.

6) Mesin dan Peralatan

Mesin dan peralatan meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor/bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium/kesenian/olah raga, mesin dan peralatan persenjataan dan lain-lain sejenis.

7) Kendaraan

Kendaraan meliputi kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.

8) Mebelaur dan perlengkapan

Mebeleur dan perlengkapan meliputi inventaris dan perlengkapan kantor, inventaris dan perlengkapan rumah tangga, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghaegaan dan lain-lain sejenisnya.

9) Buku perpustakaan

Buku perpustakaan meliputi buku umum, filsafat, agama, ilmu social, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, manajemen, akuntansi, pengetahuan praktis,

arsitektur, kesenian, olah raga, geografi, biologi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.

10) Hewan ternak dan tanaman

Hewan ternak dan tanaman meliputi ternak sapi, kambing, bibit tanaman, dan sejenisnya.

- d. Aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian dilakukan dengan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva dilakukan dengan berdasarkan kepada harga perolehan yang diestimasi.
- e. Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan
- f. Aktiva tetap yang diperoleh berasal dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah
- g. Dalam pengakuan aktiva tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- h. Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- i. Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- j. Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan memperpanjang usia manfaat, meningkatkan efisiensi, dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap.
- k. Penggantian utama adalah memperbaiki bagian utama aktiva tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian aktiva tetap yang diganti dari harga aktiva yang semula dan menambah biaya penggantian
- l. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya (replacement cost)
- m. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- n. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah, sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- o. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan air sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah, sampai dengan irigasi

tersebut siap untuk digunakan.

- p. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaries dan pajak.
- q. Biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola jika ada.
- r. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- s. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- t. Mebeleur dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mebeleur dan perlengkapan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- u. Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan.
- v. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hewan dan tanaman.

Pengungkapan aktiva tetap

- a. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap.
- b. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.
- c. Metode penyusutan yang diterapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah
- d. Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- e. Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan sebagainya. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Perubahan nilai aktiva tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4. Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan

5. Aktiva Lain-lain

- a. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan.
- b. Aktiva lain-lain meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan bangunan dalam pengerjaan.
- c. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dengan swasta berdasarkan perjanjian.
- e. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
- f. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
- g. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Piutang

Hutang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

1. Hutang Jangka Pendek

- a. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi
- b. Hutang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
- c. Hutang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar hutang jangka panjang dan hutang perhitungan pihak ketiga (PFK).
- d. Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- e. Bagian hutang lancar jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- f. Hutang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

2. Hutang Jangka Pendek

- a. Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
- c. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur berdasarkan mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
- d. Hutang dalam negeri merupakan hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- e. Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri diakui dalam periode berjalan.
- f. Hutang luar negeri merupakan hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- g. Hutang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana donasi.

1. Ekuitas Dana Lancar

- a. Ekuitas dana lancar adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi, yang berasal dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ini), dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan dana lancar lainnya (piutang lancar dan persediaan).

2. Ekuitas Dana Investasi

- a. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi kewajiban jangka panjang.
- b. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang diinvestasikan setelah dikurangi kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana Donasi

- a. Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi.
- b. Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibag, bantuan atau sumbangan yang telah diakui pada saat periode berjalan.

BAB V. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2017 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas OPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2017

PENGUNA ANGGARAN

Drs. LA ODE HASLAN

Pembina Tk I.

NIP. 19621231 199003 1 214